

PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA TAHUN 2022

Oleh: **Rendy Rinaldi**

Pembimbing : Dr.Auradian Marta S.IP ,M.A

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam pengembangan pariwisata, khususnya di Kecamatan X Koto Singkarak dan Kecamatan Gunung Talang pada tahun 2022. Kedua kecamatan ini memiliki potensi pariwisata yang signifikan baik dari aspek keindahan alam, kekayaan budaya, maupun produk lokal. Namun, pengembangan pariwisata masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, risiko bencana alam, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori Geoffrey C. Gunn (1994) yang menekankan tujuh peran strategis pemerintah: policy-making, planning, coordination, regulation, stimulation, control, dan public ownership. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok telah menjalankan sebagian besar fungsinya melalui kebijakan formal seperti Perda No. 5 Tahun 2020, perencanaan melalui RIPPDA, serta pelatihan masyarakat dalam pengelolaan homestay dan UMKM. Namun, partisipasi masyarakat yang masih rendah dan belum optimalnya promosi digital menjadi hambatan utama.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator, peningkatan kualitas infrastruktur, penyesuaian kebijakan antar instansi, serta optimalisasi kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat. Dengan strategi yang inklusif dan berkelanjutan, potensi pariwisata Kabupaten Solok dapat dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pengembangan Pariwisata, Kabupaten Solok, Teori Gunn, X Koto Singkarak, Gunung Talang.

Abstract

This study aims to analyze the role of the Regional Government of Solok Regency in tourism development, particularly in X Koto Singkarak and Gunung Talang Districts

in 2022. These two districts possess significant tourism potential in terms of natural beauty, cultural richness, and local products. However, tourism development in the region still faces challenges such as limited infrastructure, natural disaster risks, low community participation, and weak coordination among stakeholders.

The research employs a descriptive qualitative approach using Geoffrey C. Gunn's theory (1994), which identifies seven strategic roles of government: policy-making, planning, coordination, regulation, stimulation, control, and public ownership. Data were collected through interviews, documentation, and literature review. The results show that the Solok Regency Government has fulfilled several strategic roles, such as formulating Regional Regulation No. 5 of 2020, mid-term tourism planning (RIPPDA), and empowering local communities through training on homestay management and small enterprises. However, low public participation and suboptimal digital promotion remain major obstacles.

The study recommends strengthening the government's role as facilitator and coordinator, improving infrastructure, aligning policies across institutions, and optimizing collaboration with the private sector and local communities. With an inclusive and sustainable strategy, the tourism potential of Solok Regency can be developed to make a significant contribution to community welfare.

Keywords: Government Role, Tourism Development, Solok Regency, Gunn's Theory, X Koto Singkarak, Gunung Talang.

Pendahuluan

a. Latar Belakang

Pariwisata merupakan sektor penting yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Kontribusinya tidak hanya dalam peningkatan pendapatan asli daerah, tetapi juga dalam membuka lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan UMKM, dan menjaga kelestarian budaya lokal. Kabupaten Solok, yang dikenal sebagai 'Nagari 1000 Rumah Gadang', memiliki beragam potensi wisata, mulai dari keindahan alam seperti Danau Singkarak dan Gunung Talang, hingga kekayaan budaya Minangkabau yang otentik.

Namun demikian, potensi wisata tersebut belum tergarap secara optimal.

Data BPS (2021) menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Solok masih berada di bawah rata-rata provinsi, meskipun memiliki daya tarik wisata unggulan. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, di antaranya: keterbatasan infrastruktur jalan menuju lokasi wisata, kurangnya fasilitas pendukung wisata, lemahnya promosi digital, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

Selain itu, isu global seperti perubahan iklim dan pandemi COVID-19 juga memberikan dampak signifikan terhadap sektor pariwisata di daerah ini. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan pariwisata yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Pemerintah

daerah sebagai aktor utama memiliki peran vital dalam mengelola, mengatur, serta mendorong partisipasi berbagai pihak untuk bersama-sama memajukan sektor pariwisata. Teori Gunn (1994) yang menekankan tujuh peran pemerintah menjadi relevan dalam mengkaji sejauh mana pemerintah Kabupaten Solok menjalankan fungsi-fungsi tersebut.

Geoffrey C. Gunn (1994) dalam *Tourism Planning* mengemukakan bahwapemerintah memiliki tujuh peran utama dalam pengembangan pariwisata, yaitu: pembuatan kebijakan (policy-making), perencanaan (planning), koordinasi (coordination), regulasi (regulation), stimulasi (stimulation), pengawasan (control), dan penyediaan kepemilikan publik (public ownership).

Ketujuh peran ini merupakan pendekatan komprehensif dalam melihat bagaimana pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya sektor pariwisata, melalui penguatan regulasi,

pengembangan infrastruktur, serta pelibatan masyarakat dan sektor swasta.

Dengan menggunakan pendekatan teori Gunn, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Solok menjalankan fungsinya dalam pengembangan pariwisata, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap dinamika Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah, pelestarian budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Kabupaten Solok, khususnya di Kecamatan X Koto Singkarak dan Kecamatan Gunung Talang, memiliki potensi pariwisata yang besar, baik dari sisi keindahan alam seperti Danau Singkarak dan lanskap Gunung Talang, maupun kekayaan budaya dan produk lokal masyarakat.

1.1 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Dalam Negeri yang berkunjung ke Kecamatan di Kabupaten Solok Tahun 2022

Kecamatan	M mancanegara	Dalam negeri	Jumlah
X Koto Singkarak	-	360,982	360,982
Gunung Talang	-	240,124	240,124
Lembah Gumanti	50	141,802	141.852
Danau Kembar	45	84,778	84,823
Junjung Sirih	-	7,589	7,859
X koto Diatas	-	7,287	7,827
Lembang Jaya	118	7,014	7,132
Kubung	90	4,885	4,975
Bukit Sundi	-	4,570	4,570
Hilir Gumanti	13	1,498	1,511
Payung Sekaki	-	-	-

Tigo Lurah	-	-	-
Pantai Cermin	-	-	-
IX Koto Sungai Lasi	-	-	-
Kabupaten Solok	316	860,529	860,845

Sumber : BPS Kabupaten Solok (Kabupaten Solok dalam angka tahun 2023)

Berdasarkan analisis data pariwisata Kabupaten Solok pada tahun 2022 mencerminkan pola kunjungan yang beragam di berbagai kecamatan. Terdapat 2 Kecamatan yang unggul dari jumlah pengunjung wisata, yakni Kecamatan X Koto Singkarak dan Kecamatan Gunung Talang. Kecamatan X Koto Singkarak menonjol sebagai destinasi favorit wisatawan dalam negeri dengan jumlah pengunjung mencapai 360,982 menunjukkan daya tarik yang signifikan dari aspek objek wisata atau fasilitas yang ada di kecamatan tersebut. Sehingga pada penelitian ini akan berfokus pada Kecamatan X Koto Singkarak dan Kecamatan Gunung Talang sebagai sample dan percontohan untuk wisata kecamatan lain karena menunjukkan potensi untuk pengembangan lebih lanjut dalam mengoptimalkan daya Tarik pariwisata di kecamatan tersebut dan menjadi percontohan untuk kecamatan lain.

Dua kecamatan di Kabupaten Solok yang mencatat total kunjungan pengunjung yang cukup ramai pada tahun 2022 adalah X Koto Singkarak dan Gunung Talang. Kecamatan X Koto Singkarak mencapai puncak kunjungan dengan jumlah total 360,982 pengunjung yang terutama didominasi oleh wisatawan dalam negeri. Keberhasilan ini dapat dipandang sebagai hasil dari daya tarik unikkecamatan ini, mungkin terkait dengan kekayaan budaya, objek wisata menarik, atau strategi promosi yang efektif. Di sisi lain, Gunung Talang mencatat jumlah pengunjung sebanyak

240,124 yang juga mayoritas berasal dari wisatawan dalam negeri.

Pemerintah setempat memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola, mengembangkan dan menjadi regulator untuk pariwisata setempat, hal ini sesuai dengan peran dan kewajiban Pemerintah yang tertuang pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kepariwisata menjadi pijakan hukum yang menegaskan peran pemerintah desa dalam konteks pengelolaan pariwisata. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kapabilitas pemerintah Kabupaten dan Kecamatan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat undang-undang. Penguatan kapabilitas ini mencakup peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata.

Dari paparan fenomena dan permasalahan diatas perlu kita lakukan penelitian atas peran konkret pemerintah dalam menginisiasi, merancang, dan melaksanakan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Solok, terutama di Kecamatan X Koto Singkarak dan Kecamatan Gunung Talang, pada tahun 2022. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang **"Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Solok Tahun 2022 (Studi Kasus di Kecamatan X Koto Singkarak dan Kecamatan Gunung Talang)"**.

b. Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengidentifikasi sejauh mana peran pemerintah daerah Kabupaten Solok dalam mengembangkan pariwisata. Hal ini penting karena meskipun potensi wisata besar, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah masih relatif kecil. Selain itu, penelitian ini penting sebagai bahan evaluasi kebijakan dan strategi yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah dalam sektor pariwisata.

c. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Solok, khususnya di Kecamatan X Koto Singkarak dan Kecamatan Gunung Talang.
2. Menganalisis kendala dan faktor pendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Solok.
3. Memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk memperkuat peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.

d. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat:

1. Secara teoritis, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan dan kebijakan publik, terutama dalam kajian pariwisata.
2. Secara praktis, memberikan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Solok dalam merumuskan kebijakan pariwisata.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat

meningkatkan pemahaman akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata.

e. Kegunaan Penilitaian

1. Secara Teoritis

- 1.1 Mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan dari berbagai literatur buku dan jurnal, sehingga dapat diambil manfaat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang baik menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.2 Melatih kemampuan Penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan.
- 1.3 Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.
- 1.4 Agar penelitian ini mampu menjawab keingintahuan Penulis tentang Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Solok Tahun 2022 Studi Kasus di Kecamatan X Koto Singkarak dan Kecamatan Gunung Talang

2. Secara Praktis

2.1 Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah provinsi dan

daerah, khususnya pemerintah kabupaten Solok dalam melaksanakan upaya penyelesaian masalah pengembangan pariwisata di kecamatan X Koto Singkarak dan kecamatan Gunung Talang agar dipertimbangkan beberapa langkah strategis yang dapat diimplementasikan guna memastikan keberhasilan dan keberlanjutan inisiatif ini.

Dalam konteks ini, perlu ditekankan bahwa langkah-langkah tersebut harus didasarkan pada analisis mendalam terhadap potensi pariwisata setempat, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta memperhitungkan faktor-faktor seperti keberlanjutan lingkungan, partisipasi masyarakat, dan peningkatan infrastruktur pariwisata

2.2 Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pengetahuan masyarakat umum mengenai peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata melalui pengembangan potensi pariwisata, infrastruktur, dan lain – lain. perlu dipahami bahwa pemerintah memegang peranan krusial dalam merancang,

mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan sektor pariwisata sebagai pilar utama pengembangan ekonomi lokal.

Dengan menyediakan regulasi yang mendukung insentif finansial dan infrastruktur yang memadai, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha di sektor pariwisata, sekaligus memberikan peluang kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi yang berbasis pada potensi pariwisata setempat. Selain itu, peran pemerintah juga melibatkan upaya untuk mempromosikan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan, serta meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik yang semuanya merupakan elemen penting dalam memajukan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

a. Kerangka Teori

1. Peran Pemerintah

Konsep peran merujuk pada kata dasar "peranan" yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau posisi dalam masyarakat. Peranan dapat dilihat sebagai suatu perangkat tingkah laku yang mencerminkan norma-norma yang diikuti oleh individu yang menduduki

suatu posisi dalam struktur sosial. Menurut Slamet (1985:15), peranan lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh individu yang menempati suatu posisi dalam status sosialnya. Dalam konteks ini, peranan mencakup seluruh rentang tindakan dan perilaku yang sesuai dengan posisi sosial seseorang dalam suatu peristiwa atau kegiatan. Pemahaman terhadap konsep peran menjadi penting dalam menganalisis bagaimana individu berinteraksi dalam masyarakat dan bagaimana norma-norma sosial memengaruhi tingkah laku mereka dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Menurut Komarudin (1994:768), konsep peran dapat diartikan melalui beberapa dimensi, yakni:

- a. Bagian dari tugas utama yang menjadi tanggung jawab manajemen.
- b. Pola perilaku yang diharapkan untuk mendukung atau mencerminkan suatu status tertentu.
- c. Bagian dari suatu fungsi individu dalam kelompok atau struktur sosial tertentu.
- d. Fungsi yang diharapkan atau menjadi ciri khas yang melekat pada seseorang.
- e. Fungsi setiap variabel dalam kaitannya dengan hubungan sebab akibat.

Kunci dari upaya ini adalah melibatkan eksplorasi terhadap aset yang dimiliki oleh daerah,

termasuk pengembangan objek wisata alam sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan potensi dan daya Tarik wilayah daerah tersebut. Menurut Gunn (1994), pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata secara berkelanjutan. Peran tersebut meliputi:

1. Pembuatan Kebijakan (Policy-making): Pemerintah bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan strategis yang dapat mengarahkan pengembangan pariwisata sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat.
2. Perencanaan (Planning): Pemerintah harus menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk pengembangan destinasi pariwisata yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
3. Koordinasi (Coordination): Melibatkan koordinasi lintas sektor dan antar lembaga dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata.
4. Regulasi (Regulation): Menyusun peraturan dan ketentuan hukum untuk menjaga ketertiban dan keberlanjutan sektor pariwisata.
5. Stimulasi (Stimulation): Mendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat melalui pemberian insentif dan fasilitas.

6. Pengawasan (Control): Mengawasi pelaksanaan kebijakan serta aktivitas wisata agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Kepemilikan Publik (Public Ownership): Pemerintah menyediakan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan fasilitas umum lainnya untuk mendukung industry pariwisata.

Peran pemerintah dalam memberdayakan potensi aset daerah dianggap sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kinerja organisasi dan meningkatkan pelayanan lembaga kepada masyarakat. Seluruh aktivitas ini dianggap sebagai bagian operasional yang esensial dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif. Oleh karena itu, kebijakan yang terkait dengan manajemen aset daerah dianggap sebagai hal yang krusial dan harus dirumuskan dengan cermat. Sebagai sebuah lembaga pemerintah yang memiliki interaksi dengan masyarakat, perlu adanya kebijakan yang mengatur bagaimana desa melaksanakan fungsi dan peranannya. Ini penting karena kebijakan tersebut berkaitan erat dengan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat, termasuk perubahan istilah dari desa menjadi daerah.

2 Potensi Pariwisata

Pariwisata menjadi salah satu sektor strategis di Indonesia yang memiliki peran krusial dalam meningkatkan devisa negara. Landasan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mencakup aspek memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan serta mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia. Selanjutnya, tujuan lainnya adalah memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa. Melalui kegiatan pariwisata, dapat tercipta permintaan baik dalam konsumsi maupun investasi, yang pada akhirnya akan mendorong kegiatan produksi barang dan jasa serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Menurut Sihite, seperti yang dikutip oleh Hanief dan Permana (2018:1), mengartikan pariwisata sebagai suatu

perjalanan yang dilakukan oleh individu untuk sementara waktu yang diorganisir dari satu tempat ke tempat lain dengan meninggalkan lokasi asal sesuai dengan suatu perencanaan tertentu. Dalam konteks ini, perjalanan tersebut bukan dilakukan dengan tujuan mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan, rekreasi, atau untuk memenuhi berbagai keinginan pribadi yang bervariasi.

Dengan adanya destinasi pariwisata yang memiliki daya tarik yang kuat, potensi tersebut menjadi daya magis yang mampu menarik perhatian para wisatawan, sebagaimana sebagaimana diungkapkan oleh Muljadi (2012:89). Untuk memastikan pengembangan kepariwisataan yang berhasil, perlu diperhatikan tiga aspek penting dalam produk pariwisata yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Atraksi, sebagai pusat dari industri pariwisata, memiliki peran kunci dalam menarik minat para wisatawan yang tertarik mengunjungi suatu lokasi. Faktor-faktor menarik seperti keindahan alam, iklim, cuaca, dan kebudayaan sering menjadi ciri khas yang memikat para pengunjung. Selanjutnya, amenitas mencakup berbagai

fasilitas pendukung yang memastikan kenyamanan dan kepuasan para wisatawan selama berkunjung, seperti akomodasi yang nyaman, restoran, bar, layanan informasi, pramuwisata, serta keamanan. Terakhir, aksesibilitas mencakup aspek transportasi, jarak, dan kemudahan pencapaian suatu objek wisata, beserta unsur pendukung lainnya seperti peran pelaku industri pariwisata, partisipasi masyarakat setempat, dan kontribusi institusi pengembangan, yang bersinergi dalam menciptakan motivasi bagi kunjungan wisatawan

b. Studi Terdahulu

Studi-studi terdahulu menjadi salah satu pedoman bagi Penulis dalam melaksanakan penelitian yang pada gilirannya berkontribusi pada pengembangan teori yang menjadi landasan analisis penelitian ini. Beberapa jurnal terdahulu telah dijadikan sebagai referensi yang signifikan dalam membentuk kerangka kerja dan konsep-konsep yang digunakan dalam menggali lebih dalam dalam penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rotua Kristin Simamora dan Rudi Salam Sinaga. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam

mengembangkan potensi wisata alam dan wisata budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. Hasil penelitian peran Peran Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara dominan sebagai fasilitator dibandingkan dengan peran lainnya yaitu sebagai motivator dan dinamisator. Peran sebagai fasilitator ini terlihat terutama pada hal penyediaan sarana prasarana obyek yang sebagian besar masih ditanggung oleh Dinas, fasilitas penyaluran bantuan dana stimulan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan sebuah obyek wisata, upaya promosi obyek wisata, serta fasilitas yang diberikan pada pihak ketiga seperti investor dan pengusaha wisata untuk mengembangkan usaha wisatanya di Kabupaten Tapanuli Utara.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Andi Atrianingsi, Beddu Lahi, Sitt Mirsa. Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Wisata Malino Sebagai "Beautiful Malino" Di Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah dalam mengembangkan daerah wisata Malino sebagai destinasi wisata yang populer dengan istilah Beautiful Malino. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan Malino sebagai daerah wisata di Kabupaten Gowa telah terlaksana dengan baik. Dimana hasil yang dicapai karena pemerintah telah melaksanakan perannya sebagai motivator, fasilitator, dinamisator.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Eet Saeful Hidayat dan R Didi Djadjuli. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya. Tujuan penelitian ini peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata Curug Kembar yang merupakan obyek wisata masih perawan, belum ada pembangunan dalam hal sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi suatu obyek wisata. Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa peran pemerintah Desa Raksabaya dalam mengembangkan potensi wisata Curug Kembar sudah on the track, diwujudkan dalam penataan lokasi wisata dengan keragaman fasilitas dan perbaikan infrastruktur pendukung lainnya. Peran tersebut telah sesuai dengan peran pemerintah sebagai stabilisator, inovator, dan pelaksana sendiri. Dalam pengembangan potensi wisata yang menjadi faktor pendukung antara lain daya dukung regulasi, sumber daya alam dan bantuan dari pemerintah. Faktor penghambat, kurangnya daya dukung SDM yang rendah dan rendahnya peran serta perangkat dan masyarakat.

Keempat, penelitian yang dilakukan Zeferino Martins, Syamsul Alam Paturusi, dan Ida Bagus Ketut Surya. Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Di Area Branca Metiaut, Dili. Penelitian ini mengkaji peran pemerintah dalam pengembangan Aera Branca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang mendukung dan menghalangi dalam upaya untuk

mengembangkan Area Branca Metiaut sebagai tujuan wisata. Faktor pendukung meliputi keindahan alam dari daerah dengan pantai berpasir putih yang menakjubkan. Faktor-faktor kendala termasuk kurangnya infrastruktur, sumber daya manusia, dan fasilitas pariwisata. Melalui analisis SWOT itu dipilih strategi terutama pentingnya pemerintah untuk memainkan perannya terutama dalam regulasi dan kebijakan dalam penyediaan infrastruktur dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan sadar wisata.

Kelima, penelitian yang dilakukan Fenti Prihatini Tui, Rosman Ilato, Rusli Isa, Juriko Abdussamad, Arif Bobihu, Mutia Hunaini. Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kawasan Pesisir Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Kawasan Pesisir Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pemerintah sebagai regulator, belum optimal meskipun sudah ada regulasi namun penyelenggaraan pariwisata belum terkelola dengan baik. Peran pemerintah sebagai dinamisator sudah optimal, hal ini ditunjukkan dengan adanya program-program yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan rutin setiap tahun sehingga berdampak pada meningkatkan Pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung di setiap objek wisata yang ada di Kabupaten

Bone Bolango. Peran pemerintah sebagai fasilitator sudah optimal hal ini dapat dilihat dengan adanya berbagai program diantaranya penyediaan fasilitas pemasaran pariwisata yang berbasis Teknologi Informasi, dan Peran pemerintah sebagai katalisator dalam mempercepat pengembangan potensi daerah meskipun sudah terlaksana namun belum optimal. Hal ini diakibatkan oleh penolakan masyarakat pelaku usaha terhadap kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan pajak retribusi masuk ke 14 tempat objek wisata.

Sementara Penelitian ini akan difokuskan pada perbedaan peran Pemerintah Kabupaten Solok dalam pengembangan pariwisata tahun 2022, dengan studi kasus dua kecamatan, yaitu Kecamatan X Koto Singkarak dan Kecamatan Gunung Talang. Dalam penelitian pertama, peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengembangan potensi pariwisata dominan terlihat dalam penyediaan sarana prasarana, bantuan dana stimulan, upaya promosi, dan fasilitas untuk investor. Penelitian kedua, menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengembangkan Malino sebagai destinasi "Beautiful Malino" telah terlaksana dengan baik sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator. Penelitian ketiga, peran pemerintah desa dalam pengembangan Curug Kembar dengan fokus pada penataan lokasi, fasilitas, dan perbaikan infrastruktur pendukung. Sementara itu, penelitian keempat, mengevaluasi peran pemerintah dalam mengembangkan Area

Branca Metiaut di Dili, dengan fokus pada faktor pendukung dan kendala, serta strategi SWOT. Terakhir, penelitian kelima menyoroti peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator dalam pengembangan potensi pariwisata di kawasan pesisir, dengan menekankan optimalitas pelayanan, program rutin, fasilitas pemasaran berbasis Teknologi Informasi, dan kebijakan pajak retribusi. Melalui analisis perbedaan ini, diharapkan dapat teridentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran Pemerintah Kabupaten Solok dalam pengembangan pariwisata di dua kecamatan yang memiliki potensi pengunjung yang banyak

Metode Penelitian

- a. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
- b. Jenis Penelitian
Penelitian kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif.
- c. Lokasi Penelitian
Kabupaten Solok, khususnya Kecamatan X Koto Singkarak dan Kecamatan Gunung Talang.
- d. Jenis Data
Data primer (wawancara) dan sekunder (dokumen, publikasi BPS, literatur).
- e. Sumber Data
Kepala Dinas Pariwisata, Camat, tokoh masyarakat, dokumen resmi pemerintah.

- f. Teknik Pengumpulan Data
Wawancara mendalam, studi dokumentasi, observasi, studi literatur.
- g. Teknik Analisis Data
Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

a. Policy Making

Peran pemerintah dalam pembuatan kebijakan diwujudkan melalui lahirnya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kepariwisata. Regulasi ini menjadi dasar hukum yang jelas bagi pengembangan sektor pariwisata. Perda ini mengatur aspek perencanaan, pengelolaan, promosi, hingga pengawasan destinasi wisata. Namun implementasinya masih terbatas, terutama dalam aspek pengawasan dan koordinasi antar instansi.

b. Planning

Pemerintah Kabupaten Solok telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang memuat strategi pengembangan destinasi unggulan. RIPPDA menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, dan promosi wisata. Namun, keterbatasan anggaran membuat beberapa rencana belum terimplementasi sepenuhnya.

c. Coordination

Koordinasi antar instansi pemerintah dalam pengembangan pariwisata masih menjadi kendala. Beberapa program berjalan sendiri-

sendiri tanpa integrasi. Akibatnya, terdapat duplikasi program dan kurangnya efektivitas kebijakan. Diperlukan forum koordinasi lintas sektor agar perencanaan dan pelaksanaan program lebih sinergis.

d. Stimulation

Pemerintah Kabupaten Solok berupaya memberikan stimulasi kepada masyarakat melalui pelatihan pengelolaan homestay, pelatihan UMKM berbasis pariwisata, serta promosi digital. Namun partisipasi masyarakat masih rendah karena minimnya kesadaran dan keterbatasan sumber daya manusia. Pemerintah perlu mendorong partisipasi masyarakat dengan memberikan insentif dan dukungan berkelanjutan.

e. Public Ownership

Pemerintah telah berperan dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti akses jalan, fasilitas umum, dan rest area di sekitar lokasi wisata. Namun kualitas infrastruktur masih jauh dari memadai. Jalan menuju beberapa lokasi wisata masih sulit dilalui, sehingga mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih besar pada pembangunan infrastruktur pariwisata.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peran Pemerintah Kabupaten Solok dalam pengembangan pariwisata sudah terlihat pada aspek kebijakan, perencanaan, koordinasi, stimulasi, dan kepemilikan publik. Namun, implementasi di

lapangan masih menghadapi tantangan besar. Infrastruktur yang belum memadai, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya koordinasi menjadi hambatan utama.

Saran yang dapat diberikan adalah:

- a. Policy Making: Perlu penguatan implementasi Perda No. 5 Tahun 2020.
- b. Planning: Perlu alokasi anggaran yang lebih besar untuk implementasi RIPPDA.
- c. Coordination: Membentuk forum koordinasi lintas sektor secara rutin.
- d. Stimulation: Meningkatkan insentif dan dukungan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pariwisata.
- e. Public Ownership: Mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur pariwisata.

Daftar Pustaka

Buku

- Becken, S., & Hay, J. (2012). *Climate Change and Tourism: From Policy to Practice*. Routledge.
- Gunn, C. A. (1994). *Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases*. Taylor & Francis.
- Hanief, S., & Permana, S. (2018). Konsep Pariwisata dan Pengembangan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial*, 4(2), 1-10.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*.

Alfabeta.

Simamora, R. K., & Sinaga, R. S. (2018). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Wisata Alam di Tapanuli Utara. *Jurnal Administrasi Publik*.

Atrianingsi, A., Lahi, B., & Mirsa, S. (2019). Peran Pemerintah dalam Mengembangkan Wisata Malino di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Hidayat, E. S., & Djadjuli, R. D. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar. *Jurnal Ilmu Sosial*.

Martins, Z., Paturusi, S. A., & Surya, I. B. K. (2020). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata di Dili. *Jurnal Kajian Kebijakan*.

Tui, F. P., Ilato, R., & Isa, R. (2021). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Kawasan Pesisir Bone Bolango. *Jurnal Pariwisata*.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS.